

Gaduh Pagar Laut, Pengamat: Kita Luput Mengawasi Jokowi

Category: Nasional, News

written by Redaksi | 25/01/2025



ORINews.id – Pengakuan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono terkait adanya ratusan kasus pagar laut seperti di Tangerang, Banten, menunjukkan bahwa pengawasan publik terhadap pemerintah lemah.

Sebab, dengan adanya 169 kasus pagar laut di berbagai daerah tersebut semakin menunjukkan bahwa praktik culas tersebut telah terjadi sejak era Presiden ke-7 [Joko Widodo](#).

Praktek culas itu kemudian muncul menjadi polemik dan diselesaikan dengan ketegasan di awal pemerintahan Presiden [Prabowo Subianto](#), dengan langsung memerintahkan TNI AL membongkar pagar laut di Tangerang.

“Sepertinya ada efek pengawasan yang luput dari glorifikasi tingkat kepuasan yang mencapai 70 persen, atau 80 persen di era Pak [Jokowi](#). Akibatnya, banyak hal dalam tata kelola pemerintahan tidak dilakukan semestinya,” kata [Pengamat Politik](#) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ray Rangkuti kepada RMOL, Sabtu 25 Januari 2025.

“Contohnya, banyak kasus yang berhubungan dengan pemberian HGB, seperti yang terjadi di Laut Tangerang dan

lainnya,"imbuhnya.

Menurut Ray, klaim atas tingginya tingkat kepuasan sebagaimana dikampanyekan lembaga survei terhadap Jokowi kala itu, justru membuat publik luput untuk mengawasi tata kelola pemerintahan.

"Begitu pemerintahan berganti berbagai macam pengelolaan pemerintahan yang tidak tepat itu satu per satu mulai bermunculan dan ini tentu saja sangat merepotkan," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia ini.

Tak hanya soal pagar laut, Ray juga menyoroti lambannya reformasi birokrasi khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan pertanahan di Indonesia saat era Jokowi.

Faktanya, diungkap Aktivis 98 ini, di lapangan selain tingkat korupsi yang makin meningkat, ternyata tata kelola pemerintahannya juga penuh dengan ketertutupan akibatnya banyak pungli, banyak surat-surat palsu dan sebagainya beredar di tengah masyarakat.

Atas dasar itu, Ray menyarankan Presiden [Prabowo](#) untuk melakukan pembenahan atas situasi yang terjadi di berbagai sektor.

"Prabowo harus merevisi dan mengubah semua hal ini. Jika tidak, jangan bermimpi, kita akan sampai ke indonesia emas 2030," pungkasnya.[source:rmol]